



Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS 2021-2026



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam Tahun 2021-2026. Renstra ini merupakan penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD. Renstra memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026. Renstra BPKAD juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator *output* kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi pada hasil.

Penyusunan Renstra ini secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap pembangunan Daerah Kota Batam.

Kami berharap agar Rencana Strategis 2021-2026 ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.

Batam, 22 Desember 2021

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Batam,



ABD. MALIK, S.E., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP.19660727 199603 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.1.1 Pengertian Renstra Perangkat Daerah.....	1
1.1.2 Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	2
1.1.3 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	2
1.1.4 Keterkaitan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah...3	
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD.....	13
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	13
2.2 Sumber Daya	18
2.2.1 Kondisi Umum Pegawai	18
2.2.2 Sarana dan Prasarana	20
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.....	21
2.3.1 Capaian kinerja pada dimensi pelaksanaan Program dan Kegiatan ...22	
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	28
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	28
3.1.1 Organisasi dan Ketatalaksanaan.....	28
3.1.2 Sumber Daya Manusia Aparatur.....	28
3.1.3 Sarana Prasarana	29
3.1.4 Pelayanan Publik	29
3.1.5 Pola pikir (<i>Mindset</i>) dan Budaya Kerja (<i>Culture Set</i>).....	30
3.2 Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 2021- 2026	36

3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	37
3.3.1	Renstra Kementerian Keuangan.....	37
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .	38
3.4.1	Rencana Tata Ruang.....	38
3.4.2	Kajian Lingkungan Hidup Strategis	39
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	39
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN		42
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....		43
5.1	Strategi	43
5.1.1	Analisa Lingkungan Internal.....	43
5.1.2	Analisa Lingkungan Eksternal	44
5.2	Arah Kebijakan	45
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....		47
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		52
BAB VIII PENUTUP		54

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Klasifikasi pegawai BPKAD Kota Batam Menurut Usia-Unit Kerja	18
Tabel 2. 2Klasifikasi Pegawai BPKAD Kota Batam menurut Golongan-Unit Kerja .	18
Tabel 2. 3 Klasifikasi pegawai BPKAD Kota Batam menurut Jenis Kelamin-Unit Kerja.....	19
Tabel 2. 4 Klasifikasi pegawai BPKAD Kota Batam menurut Tingkat Pendidikan-Unit Kerja	19
Tabel 2. 5 Klasifikasi pegawai BPKAD Kota Batam menurut Jabatan-Kebutuhan.	20
Tabel 2. 6 Sarana dan Prasarana BPKAD.....	20
Tabel T-C.23/2. 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.....	23
Tabel T-C.24/2. 8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.....	25
Tabel 3. 1 Identifikasi Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah	31
Tabel 3. 2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.....	33
Tabel T-C.25 /4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	42
Tabel T-C.26/5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	46
Tabel T-C.27 /6. 1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.....	49
Tabel T-C.28 /7. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra BPKAD Kota Batam	3
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam.....	17
Gambar 5. 1 Bagan SWOT	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renstra Perangkat Daerah

Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Agar pembangunan daerah lebih terarah dan terukur maka diperlukan perencanaan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya Menyusun rencana pembangunan daerah dengan prinsip- prinsip, meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD sedangkan Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

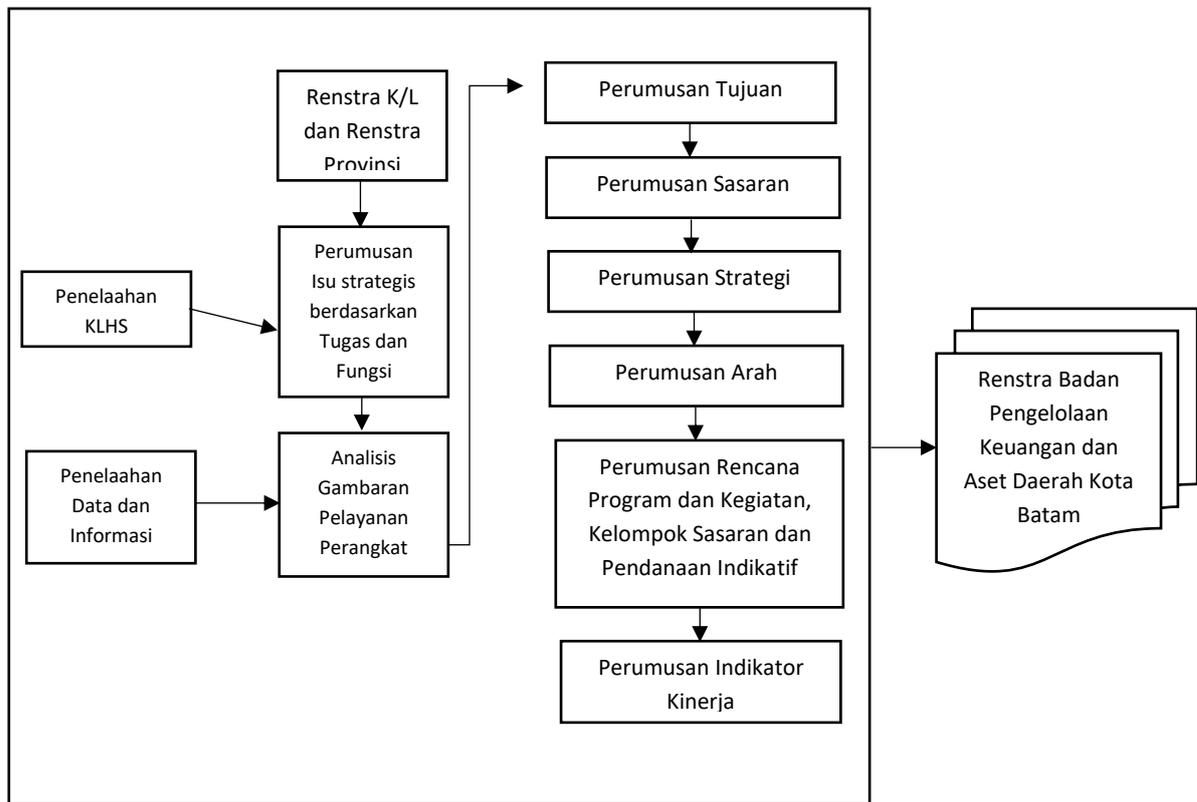
1.1.2 Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Batam Nomor KPTS /HK/ /2021 Tahun 2021 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2021-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Sebagaimana amanat tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai kewenangan dan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis yang disusun oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam merupakan langkah awal untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dalam pengelolaannya perlu melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara tertib, taat peraturan-perundangan, efektif, efisien, transparan, profesional dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat, juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode lima (5) tahun yang akan datang, yang dijabarkan kedalam Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.

1.1.3 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Tahapan penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dapat dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra BPKAD Kota Batam

Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam 2021-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2021-2026, dengan melihat hasil kegiatan pembangunan yang dicapai pada lima tahun sebelumnya (periode 2016-2021). Isu strategis yang dihadapi serta mempertimbangkan kajian strategis sebagai bentuk upaya menjaga keberlanjutan capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baik, serta rumusan kegiatan penting yang belum terlaksana untuk dilaksanakan pada periode selanjutnya. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, dan merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

1.1.4 Keterkaitan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

A. Keterkaitan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dengan RPJMD Kota Batam

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan nasional dan daerah

menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu suatu dokumen perencanaan pembangunan saling terkait dengan dokumen perencanaan lainnya.

Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Perencanaan strategis BPKAD dan RPJMD merupakan obyek pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup Kota . Perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja BPKAD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota, menjadi obyek pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD lingkup Kota. Apakah perumusan kebijakan perencanaan strategis SKPD kabupaten/kota, sudah atau belum berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, dan, sudah atau belum memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis, akan dipantau dan disupervisi . Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra BPKAD sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD. Rancangan awal RPJMD menjadi pedoman BPKAD dalam menyusun rancangan Renstra BPKAD. Rancangan Renstra BPKAD menjadi bahan penyusunan rancangan RPJMD. Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra BPKAD untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD, antara lain dalam:

- a. memecahkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD;
- b. menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran;
- c. menyelaraskan dengan strategi dan arah kebijakan;
- d. mempedomani kebijakan umum dan program pembangunan daerah dan mempedomani indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan Renstra BPKAD dan penyusunan RPKD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah . Renstra BPKAD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam Renstra BPKAD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD, sesuai tugas dan fungsi BPKAD. Visi BPKAD dalam Renstra BPKAD merupakan keadaan yang ingin diwujudkan BPKAD pada akhir

periode Renstra BPKAD, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam RPJMD.

Penyusunan rancangan Renstra BPKAD mengacu pada Surat Edaran Wali Kota. SE Wali Kota ini dilampiri rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD. Perumusan rancangan Renstra BPKAD merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD.

Verifikasi rancangan Renstra BPKAD sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD. Penyusunan rancangan akhir Renstra BPKAD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra BPKAD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra BPKAD bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD yang ditetapkan dalam RPJMD

B. Keterkaitan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dengan Renstra K/L

Perumusan rancangan Renstra SKPD kabupaten/kota mencakup (salah satunya) review renstra kementerian/lembaga. Analisis Renstra K/L (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L; dan
- b. apakah tingkat capaian kinerja Renstra SKPD kabupaten/kota melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra K/L.

Jika tingkat capaian kinerja Renstra SKPD kabupaten/kota melebihi sasaran Renstra K/L, maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja SKPD sudah baik secara nasional. Sedangkan jika lebih rendah, maka hal ini mengindikasikan bahwa SKPD tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanannya, seperti dalam perencanaan program, kegiatan, dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pelayanan, proses/prosedur/mekanisme pelayanan, dan strategi/kebijakan pelayanan yang ditempuh.

C. Keterkaitan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dengan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota mencakup (salah satunya) review Renstra Perangkat Daerah Provinsi . Analisis Perangkat Daerah Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota terhadap sasaran Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Perangkat Daerah Provinsi; dan
- b. apakah tingkat capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota melebihi/sama/kurang dari sasaran Perangkat Daerah Provinsi.

Jika tingkat capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota melebihi sasaran Perangkat Daerah Provinsi, maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja Perangkat Daerah sudah baik secara nasional. Sedangkan jika lebih rendah, maka hal ini mengindikasikan bahwa Perangkat Daerah tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanannya, seperti dalam perencanaan program, kegiatan, dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pelayanan, proses/prosedur/mechanisme pelayanan, dan strategi/ kebijakan pelayanan yang ditempuh.

D. Keterkaitan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dengan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam

Renja BPKAD disusun dengan berpedoman kepada Renstra BPKAD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat . Renja BPKAD memuat program dan kegiatan yang sedang berjalan yaitu program dan kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam Renstra BPKAD. Renja BPKAD bisa memuat program dan kegiatan baru yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada Renstra SKPD dengan kriteria sebagai berikut:

- a. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi

- pemerintah maupun masyarakat;
- b. dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra SKPD;
- c. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
- d. dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD.

Rancangan Renja BPKAD disusun diantaranya mengacu pada Renstra BPKAD. Selain mengacu pada Renstra BPKAD, mengacu pula pada:

- a. mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
- c. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
- d. berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Rancangan Renja BPKAD memuat tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD, selaras dengan dan mengacu pada Renstra BPKAD. Perumusan rancangan Renja BPKAD diantaranya mencakup review hasil evaluasi Renja BPKAD tahun lalu berdasarkan Renstra BPKAD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam adalah mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
26. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 87);
27. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021);
29. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 77 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan;
30. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Organisasi Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Organisasi Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RPJPD Kota Batam, yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2021 -2026 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan stakeholders dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah di kota Batam untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam adalah :

1. Menetapkan strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.

2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
4. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
5. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja OPD, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi OPD
- 2.2 Sumber Daya OPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

BAB III PERMASLAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dibentuk berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 1);
2. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 77 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan;
3. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 31 Tahun 2022 Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam mempunyai Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan pelaporan, bidang aset serta pengelolaan dana bergulir;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan pelaporan, bidang aset serta pengelolaan dana bergulir;
- c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan pelaporan, bidang aset serta pengelolaan dana bergulir; dan
- d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Badan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam merupakan OPD penggabungan dari Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Batam dan Bagian Aset Sekretariat Daerah Kota Batam dan berdasarkan peraturan tersebut bahwa

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam adalah sebagai berikut:

Kepala Badan membawahi Sekretariat, 4 (empat) Bidang dan 1 (satu) UPT yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Sekretariat Membawahi 1 (satu) Sub Bagian dan kelompok jabatan fungsional, yaitu:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Jabatan Fungsional Perencana; dan
 - c. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
2. Bidang Anggaran, membawahi 2 (dua) Sub Bidang dan kelompok jabatan fungsional, yaitu:
 - a. Sub Bidang Anggaran Pendapatan Daerah;
 - b. Sub Bidang Anggaran Belanja Daerah; dan
 - c. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
3. Bidang Perbendaharaan, membawahi 2 (dua) Sub Bidang dan kelompok jabatan fungsional, yaitu:
 - a. Sub Bidang Pengeluaran Belanja Daerah;
 - b. Sub Bidang Belanja Pegawai; dan
 - c. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi 2 (dua) Sub Bidang dan kelompok jabatan fungsional, yaitu:
 - a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan; dan
 - b. Sub Bidang Akuntansi Belanja;
 - c. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
5. Bidang Aset, membawahi 2 (dua) Sub Bidang dan kelompok jabatan fungsional, yaitu:
 - a. Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan Aset Daerah;
 - b. Sub Bidang Penilaian dan Pemanfaatan Aset Daerah; dan
 - c. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
6. UPT Pengelolaan Dana Bergulir, membawahi 1 (satu) Sub Bagian, yaitu:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha.

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan

pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset, serta pengoordinasian tugas-tugas di Bidang.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam mempunyai Fungsi:

- a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana kerja serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kerja pada lingkup Badan;
- b. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Badan;
- c. pelaksanaan dan pelaporan keuangan pada lingkup Badan;
- d. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan Barang Milik Daerah serta urusan dokumentasi dan informasi;
- e. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- f. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang dan UPTD;
- g. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan serta pengendalian dan penyediaan anggaran belanja daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam mempunyai Fungsi:

- a. mengoordinasikan penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS dan rancangan KUA Perubahan/PPAS perubahan;
- b. mengoordinasikan penyusunan RKA/DPA Perangkat Daerah dan RKA/DPA Perangkat Daerah Perubahan;
- c. melaksanakan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- d. menyusun pedoman penyusunan APBD;
- e. mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan, anggaran belanja daerah, dan anggaran pembiayaan;
- f. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta urusan pemerintahan daerah bidang anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan serta pengendalian dan penyediaan anggaran belanja daerah; dan

- g. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan serta pengendalian dan penyediaan anggaran belanja daerah.

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup pengeluaran belanja Daerah, pengelolaan Kas Daerah, dan belanja pegawai.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam mempunyai Fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program lingkup pengeluaran belanja daerah, pengelolaan kas daerah dan belanja pegawai;
- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup pengeluaran belanja daerah, pengelolaan kas daerah dan belanja pegawai;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta urusan pemerintahan daerah bidang pengeluaran belanja daerah, pengelolaan kas daerah dan belanja pegawai; dan
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengeluaran belanja daerah, pengelolaan Kas Daerah dan belanja Pegawai.

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup Akuntansi dan Pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam mempunyai Fungsi:

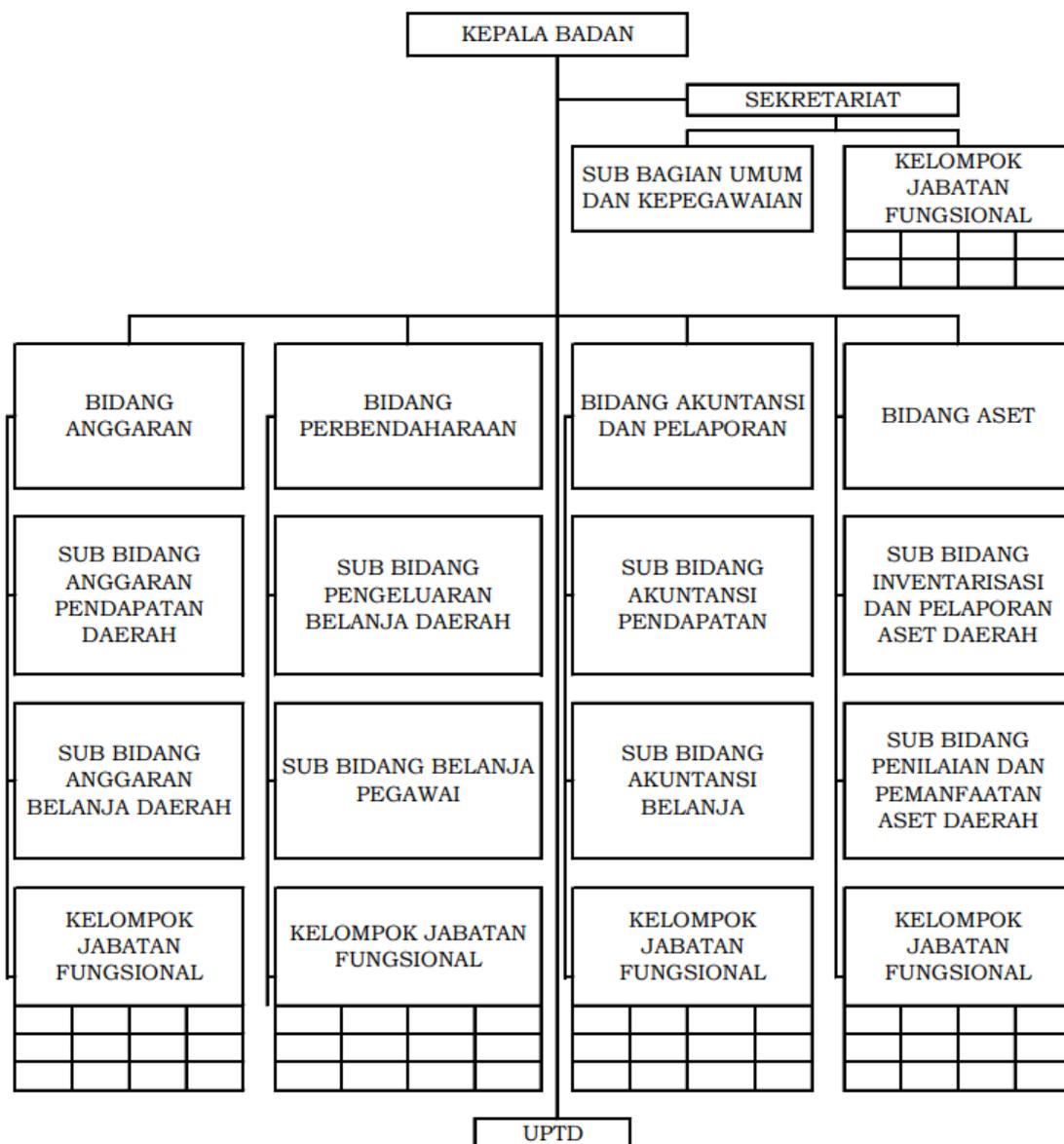
- a. penyusunan rencana dan program lingkup akuntansi dan pelaporan;
- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup akuntansi dan pelaporan;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta urusan pemerintahan daerah bidang akuntansi dan pelaporan; dan
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan lingkup akuntansi dan pelaporan.

Kepala Bidang Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup perencanaan dan analisa kebutuhan aset Daerah, inventarisasi dan pelaporan aset Daerah, penilaian dan pemanfaatan aset Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam mempunyai Fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program lingkup perencanaan dan analisa kebutuhan aset daerah, inventarisasi dan pelaporan aset Daerah, penilaian dan pemanfaatan aset Daerah;

- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup perencanaan dan analisa kebutuhan aset Daerah, inventarisasi dan pelaporan aset Daerah, penilaian dan pemanfaatan aset Daerah;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan dan analisa kebutuhan aset Daerah, inventarisasi dan pelaporan aset daerah, penilaian dan pemanfaatan aset Daerah; dan
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan dan analisa kebutuhan aset Daerah, inventarisasi dan pelaporan aset Daerah, penilaian dan pemanfaatan aset Daerah



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam

2.2 Sumber Daya

2.2.1 Kondisi Umum Pegawai

Dalam menjalankan tugas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam didukung oleh sumber daya manusia yang berjumlah 78 orang dengan rincian Pegawai Negeri Sipil berjumlah 59 orang dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil/ Kontrak berjumlah 21 orang.

a. Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Usia-Unit Kerja

Klasifikasi Pegawai berdasarkan usia-unit kerja dapat dijelaskan melalui Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2. 1 Klasifikasi pegawai BPKAD Kota Batam Menurut Usia-Unit Kerja

Kelompok Umur	Unit kerja													Total	
	Kepala		Sekretariat		Bidang Anggaran		Bidang Perbendaharaan		Bidang Akuntansi		Bidang Aset		UPTD		
	PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS	PNS		Non-PNS
20-25	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	1	1	8	
26-30	0	1	1	0	0	1	2	3	2	3	3	1	3	20	
31-35	0	0	3	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	8	
36-40	0	2	0	4	0	6	0	1	0	2	0	0	2	17	
41-45	0	9	0	5	0	6	0	4	0	3	0	2	0	29	
46-50	0	2	0	2	0	1	0	2	0	2	0	3	0	12	
51-55	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	
56-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
JUMLAH														98	

b. Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan-Unit Kerja

Klasifikasi Pegawai berdasarkan golongan-unit kerja dapat dijelaskan melalui Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2. 2Klasifikasi Pegawai BPKAD Kota Batam menurut Golongan-Unit Kerja

Golongan	Unit kerja							Total
	Kepala	Sekretariat	Bidang Anggaran	Bidang Perbendaharaan	Bidang Akuntansi	Bidang Aset	UPTD	
II/a	0	0	0	0	0	0	0	0
II/b	0	0	0	0	0	0	0	0
II/c	0	1	1	1	0	0	1	4
II/d	0	3	0	0	1	0	1	5
III/a	0	1	1	6	1	3	0	12
III/b	0	4	2	6	3	3	1	19
III/c	0	4	2	6	2	2	2	18

Golongan	Unit kerja							Total
	Kepala	Sekretariat	Bidang Anggaran	Bidang Perbendaharaan	Bidang Akuntansi	Bidang Aset	UPTD	
III/d	0	1	4	2	3	0	1	11
IV/a	0	0	2	0	0	0	0	2
IV/b	0	1	0	0	0	0	0	1
IV/c	1	0	0	0	0	0	0	1
IV/d	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH								73

c. Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin-Unit Kerja

Klasifikasi Pegawai berdasarkan jenis kelamin-unit kerja dapat dijelaskan melalui Tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2. 3 Klasifikasi pegawai BPKAD Kota Batam menurut Jenis Kelamin-Unit Kerja

Jenis Kelamin	Unit kerja													Total	
	Kepala		Sekretariat		Bidang Anggaran		Bidang Perbendaharaan		Bidang Akuntansi		Bidang Aset		UPTD		
	PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS	PNS
Laki-Laki	1	6	2	7	0	7	4	1	1	3	2	3	6	28	15
Perempuan	0	9	2	5	2	9	0	9	2	8	3	5	1	45	10
JUMLAH														73	25

d. Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan-Unit Kerja

Klasifikasi Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan-unit kerja dapat dijelaskan melalui Tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2. 4 Klasifikasi pegawai BPKAD Kota Batam menurut Tingkat Pendidikan-Unit Kerja

Tingkat Pendidikan	Unit kerja													Total
	Kepala		Sekretariat		Bidang Anggaran		Bidang Perbendaharaan		Bidang Akuntansi		Bidang Aset		UPTD	
	PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS
SMA	0	2	2	1	1	2	2	1	1	0	0	3	3	18
D-III	0	4	1	3	0	1	0	1	0	0	4	0	2	16
D-IV/S-1	0	7	1	4	1	12	2	7	1	8	1	4	2	50
S-2	1	2	0	4	0	1	0	2	0	3	0	1	0	14
S-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH														98

e. Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan-Kebutuhan

Klasifikasi Pegawai berdasarkan jabatan-kebutuhan dapat dijelaskan melalui Tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2. 5 Klasifikasi pegawai BPKAD Kota Batam menurut Jabatan-Kebutuhan

Jabatan	Aktual	Kebutuhan
Eselon II	1	1
Eselon III	5	5
Eselon IV	11	11
Pelaksana	49	77
Jabatan Fungsional	7	44

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam ditunjang dengan tersedianya sebuah gedung kantor dan perlengkapan kantor lainnya (Bagian Keuangan) dapat dilihat pada Tabel 2.6 sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Sarana dan Prasarana BPKAD

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI				KET
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kendaraan Roda Empat	2	Baik				
2	Komputer	30	Baik				
3	Laptop	5	Baik				
4	Printer	32	Baik				
5	TV	3	Baik				
6	AC	9	Baik				
7	Meja Kerja	33	Baik				
8	Kursi Kerja	35	Baik				
9	Brand Kas	7	Baik				
10	Dispenser	3	Baik				
11	Filing	6	Baik				
12	Rak kayu	3	Baik				
13	Lemari Kaca	2	Baik				
14	Lemari Arsip	1	Baik				
15	Lemari File / Lemari Arsip	7	Baik				
16	Lemari Besi	2	Baik				
17	Lemari Es	2	Baik				

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI				KET
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Telepon	2	Baik				
19	Mesin Foto Copy	1	Baik				
20	Gorden	4	Baik				
21	Karpet	1	Baik				
22	Sofa	2 set	Baik				
23	Meja Sofa	2 set	Baik				
24	Proyektor	3	Baik				
25	Ic Recorder	1	Baik				
26	Scanner	2	Baik				
27	Penghancur Kertas	7	Baik				
28	Kamera Digital	1	Baik				
29	UPS	10	Baik				
30	Meja Kaca	2	Baik				
31	Server	2	Baik				
32	Alat Pemadam	2	Baik				
33	Speddy	2	Baik				
34	CCTV	3	Baik				
35	Mesin Hitung Uang	2	Baik				
36	Jam Dinding	2	Baik				

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) yang menjalankan fungsi-fungsi Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi dalam pelaksanaan Kebijakan Daerah. Fungsi-fungsi tersebut dijalankan melalui:

1. Penyusunan Kebijakan;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan;
3. pengawasan pelaksanaan kebijakan;
4. Pembinaan administratif dan aparatur.

Pengukuran kinerja pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dapat ditinjau dari 2 (dua) dimensi, yaitu dimensi pelaksanaan

tugas, fungsi, serta kewenangannya dan dimensi keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakannya. Pengukuran kinerja dari dimensi pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dinilai dari sejauh mana suatu organisasi berperan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya serta pelaksanaan administrasi perkantoran secara umum.

Pada dimensi lain, pengukuran kinerja dinilai dari kemampuan suatu organisasi dalam melaksanakan program-program dan kegiatan yang telah direncanakannya. Penilaian tersebut dilakukan dengan mengukur capaian indikator yang telah ditetapkan dalam perencanaan, yaitu nilai keluaran (**Output**), Hasil (**Outcome**), Manfaat (**Benefit**), serta Dampak (**Impact**) yang baru bisa diukur keberhasilannya dalam jangka panjang.

2.3.1 Capaian kinerja pada dimensi pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam capaian kinerja adalah kemampuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dalam melaksanakan program-program jangka menengah (Renstra 5 tahunan) yang telah ditetapkan. Penilaian ini mencakup capaian target Program dan kegiatan dari besaran masukan (*Input*), Keluaran (*Output*), Hasil (*Outcome*), Manfaat (*Benefit*), Dampak (*Impact*) dari suatu Program Kegiatan.

Sebagaimana yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam 2021-2026. Mengacu pada RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam melaksanakan Misi 5 RPJMD 2021-2026 Kota Batam yaitu “***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat***”.

Untuk mencapai Misi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dalam sisi perencanaan melaksanakan 3 (Tiga) Program dan 14 kegiatan. Pelaksanaan Kegiatan tersebut meliputi beberapa aspek penyelenggaraan Pemerintah diantaranya Sumber daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Perkantoran, Pengelolaan Keuangan Daerah, Penatan organisasi dan ketatalaksanaan serta Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan. Pengukuran kinerja Sekretariat Daerah khususnya Bagian Keuangan dan Capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam pada lima tahunan terakhir (2016-2021) dapat diuraikan sebagaimana yang terlihat pada Tabel T-C.23/2.7 sebagai berikut:

Tabel T-C.23/2. 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam

NO	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam					100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	-	100.00	100.00	100.00	100.00
	Tersedianya Perlengkapan administrasi perkantoran					100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	-	100.00	100.00	100.00	100.00
	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD Kota Batam					100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	-	100.00	100.00	100.00	100.00
	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur					100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	-	100.00	100.00	100.00	100.00
	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur					100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	-	100.00	100.00	100.00	100.00
	Opini Pemeriksaan BPK					Opini WTP	Opini WTP	Opini WTP	Opini WTP		Opini WTP	Opini WTP	Opini WTP	Opini WTP	-	Opini WTP	Opini WTP	Opini WTP	Opini WTP
	Tersedianya Sistem Aplikasi (SIPKD) Berbasis Akrual)					1 Paket Peningkatan Sistem Aplikasi SIPKD Lanjutan		1 Paket Peningkatan Sistem Aplikasi SIPKD Lanjutan	-	100.00	100.00	100.00	100.00						
	Terkoordinasi dan meningkatnya alokasi dana perimbangan					5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen		5 Dokumen				-	100.00			
	Terlaksananya secara tertib pengelolaan Penggajian PNS Pemerintah Kota Batam					2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		-	100.00	100.00	100.00	
	Tersedianya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah					3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	-	100.00	100.00	100.00	100.00
	Meningkatnya Pengetahuan Aparatur di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah					675 Orang	675 Orang	675 Orang	675 Orang		575 Orang	150 Orang	540 Orang	501 Orang	-	85.19	22.22	80.00	74.22
	Dokumen (Laporan Keuangan Daerah Sesuai SAP Berbasis Akrual)					8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	-	100.00	100.00	100.00	100.00

NO	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Dokumen (Evaluasi APBD)					6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	-	100.00	100.00	100.00	100.00
	Dokumen (Evaluasi Kinerja dan Pertanggungjawaban Wali Kota)					2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	100.00	100.00	100.00	
	Workshop					100 Orang/ Peserta	60 Orang/ Peserta	100 Orang/ Peserta	60 Orang/ Peserta		100 Orang/ Peserta	115 Orang			-	100.00	191.67		
	Dokumen (Perubahan APBD)					9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	-	100.00	100.00	100.00	100.00
	Dokumen (Standarisasi dan Harga Barang/Jasa)					2 Dokumen	Dokumen 1 Paket Sistem lanjutan	Dokumen 1 Paket Sistem lanjutan	2 Dokumen 1 Paket Sistem lanjutan		2 Dokumen	Dokumen 1 Paket Sistem lanjutan	Dokumen 1 Paket Sistem lanjutan	2 Dokumen 1 Paket Sistem lanjutan	-	100.00	100.00	100.00	100.00
	Dokumen (Status Aset)					2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	-	100.00	100.00	100.00	100.00
	Plang Nama Aset					65 Titik Lokasi	65 Titik Lokasi	65 Titik Lokasi	65 Titik Lokasi		65 Titik Lokasi	60 Titik Lokasi	60 Titik Lokasi	60 Titik Lokasi	-	100.00	92.31	92.31	92.31
	Dokumen (Data pemanfaatan, penilaian dan pemindahtanganan aset)					1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	100.00	100.00	100.00	100.00
	Operasionalisasi					100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	-	100.00	100.00	100.00	100.00
	Dokumen														-				
	Dokumen (Perda dan Perwako Pengelolaan Barang Daerah)					6 Dokumen					3 Dokumen				-		50.00		
	Dokumen (Perwako Penyusunan APBD dan Perjalanan Dinas)					2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen						-				
	Dokumen (Hasil Sensus Barang)						1 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen		-		100.00		
	Dokumen (Perencanaan Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang)								4 Dokumen					4 Dokumen	-				100.00
	Dokumen KUA/PPAS								4 Dokumen					4 Dokumen	-				100.00

Pada tahun 2016, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah masih di dalam lingkup Sekretariat Daerah Bagian Keuangan. Kemudian pada tahun 2017 bagian keuangan berubah menjadi Badan sehingga renstra masih dalam lingkup Sekretariat Daerah Kota Batam. Kemudian, dapat dijelaskan bahwa dari tabel T-C.23/2.7 dapat dilihat bahwa realisasi Renstra BPKAD Kota Batam 2016-2021 secara keseluruhan tercapai. Faktor yang mempengaruhi pencapaian Renstra 2016-2021 adalah keterlibatan pimpinan dalam pencapaian target yang dibuat.

Tabel T-C.24/2. 8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam

Uraian *)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BATAM		11,803,399,180.00	11,944,857,883.60	12,197,782,081.27	12,331,960,895.90		5,267,111,788.00	6,042,000,006.00	6,606,932,236.00	6,845,876,696.50		44.6	50.6	54.2	55.5	0.047	0.057
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	3,215,825,180.00	3,280,141,683.60	3,345,744,517.27	3,412,659,407.62			1,824,563,222	2,974,084,549.00	1,913,676,297		-	55.6	88.9	56.1		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	1,526,900,000.00	1,520,000,000.00	1,900,000,000.00	1,330,000,000.00			678,745,909	732,391,981.00	705,347,465.00		-	44.7	38.5	53.0		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	50,321,220,530.00	7,060,674,000.00	7,144,716,200.00	6,952,037,564.00	7,589,301,488.28	3,519,249,720	5,267,111,788	3,538,690,875	2,900,455,706.00	4,226,852,935		74.6	49.5	41.7	55.7		

Berdasarkan Tabel T-C.24/2.8 realisasi anggaran dari 3 (tiga) Program yang dijalankan BPKAD Kota Batam dapat disimpulkan bahwa realisasi tidak mencapai target dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak dijalankan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan: Perumusan kebijakan teknis di bidang, pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta Pembinaan teknis, sebagaimana disampaikan pada sub bab sebelumnya, maka cakupan pelayanan BPKAD Kota Batam diantaranya:

- a. Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD), laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan;
- b. Penyediaan Dokumen aset daerah;
- c. Pelayanan dan bimbingan terkait Keuangan dan aset daerah;
- d. Pengembangan teknologi untuk memaksimalkan Sistem Keuangan serta inovasi-inovasi yang mendukung kemudahan pelayanan;
- e. Penyediaan informasi terkait keuangan dan aset daerah;
- f. Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam dalam melaksanakan tupoksi dan memberikan pelayanan terkait perencanaan terdapat beberapa tantangan dan peluang, diantaranya:

- a. Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen;
- b. Kurangnya jumlah personil yang benar-benar memiliki kemampuan teknis dibidangnya termasuk kompetensi pendidikan staf yang berlatar belakang akuntansi dan IT;
- c. Belum meratanya kemampuan SDM di bidang keuangan dan aset daerah;
- d. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan aset/barang daerah di PD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah di PD
- e. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good governance;
- f. Perubahan Regulasi dari Pemerintah Pusat/Provinsi;
- g. Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan semakin ketat dan meningkat intensitasnya;

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya untuk mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi untuk mewujudkan pelayanan OPD yang lebih baik. Adapun Tantangan dan peluang tersebut adalah sebagai berikut :

Tantangan dalam pengembangan pelayanan OPD sebagai berikut :

1. Kinerja Laporan Keuangan yang perlu dipertahankan untuk mencapai opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang WTP;
2. Kinerja Penganggaran yang masih perlu ditingkatkan baik dari segi ketepatan waktu, ketepatan alokasi dan ketepatan dana;
3. Kinerja Perbendaharaan yang perlu ditingkatkan melayani proses pencairan baik dari OPD maupun masyarakat;
4. Kinerja Pengelolaan aset perlu ditingkatkan baik dari perencanaan kebutuhan, penatausahaan, pemanfaatan penilaian dan pemindahan aset barang milik daerah;
5. Menyediakan pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis teknologi;
6. Penyelamatan arsip OPD sebagai bukti otentik pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD;
7. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menyalurkan dana bergulir.

Peluang dalam pengembangan pelayanan OPD adalah sebagai berikut :

1. Adanya peraturan-perundangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Adanya Komitmen dari Kepala Daerah untuk meningkatkan pelayanan dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta penggunaan teknologi informasi.
3. Dukungan dan koordinasi antar pelaksana administrasi keuangan daerah, propinsi dan pusat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menjalankan tugas mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan kewenangannya, tentunya menghadapi berbagai permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diformulasikan sebagai berikut:

3.1.1 Organisasi dan Ketatalaksanaan

Organisasi dan ketatalaksanaan adalah aspek terpenting dalam pengelolaan tugas dan fungsi suatu organisasi (*Business Process*). Berkaitan dengan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi yang menjadi tanggungjawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Permasalahan yang teridentifikasi selama ini adalah belum optimalnya koordinasi antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan Dinas dan Lembaga Teknis Daerah lainnya, terutama dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan laporan keuangan dan aset.

Pada setiap periode yang ditetapkan, selalu terjadi keterlambatan bahkan masih terdapat OPD yang tidak menyampaikan laporan aset. Sehingga dukungan data dan informasi yang diperlukan tidak memberikan kontribusi yang optimal dalam penyusunan kebijakan dan laporan.

Secara umum, Pemerintah Kota Batam telah menyusun berbagai standar, sistem, prosedur, serta pedoman pelaksanaan berbagai urusan birokrasi. Namun pada pelaksanaannya belum secara optimal yang disebabkan oleh masih berubahnya beberapa peraturan.

3.1.2 Sumber Daya Manusia Aparatur

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam. Mengacu pada beban tugas dan rentang kendali di perlukan sumber daya aparatur yang yang berintegritas, capable, profesional serta berkinerja tinggi. Sehingga, dalam pengembangan sumber daya aparatur kedepan memerlukan adanya suatu standar yang mengatur kompetensi aparatur agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal.

Dalam perencanaan pengembangan sumber daya aparatur, telah didukung oleh keberadaan dokumen analisa jabatan, standar kompetensi serta analisis beban kerja namun belum diimplementasikan secara maksimal. Belum adanya dokumen standar tersebut berdampak pada tidak optimalnya upaya pengembangan Sumber daya aparatur. Kekuatan dan kelemahan dibidang sumber daya aparatur tidak dapat tergambarkan secara jelas.

Berdasarkan kondisi yang ada pada saat ini, jumlah aparatur pada tingkat pelaksanaan teknis (staf) pada beberapa bagian dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah belum memenuhi standar kebutuhan ideal.

Belum tercapainya jumlah aparatur yang proporsional sesuai dengan analisis beban kerja yang dapat memberi kontribusi terhadap peningkatan beban kerja pada bidang/sub bidang yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat diukur melalui aspek 1) pelaksanaan administrasi perkantoran secara umum terkait tugas pokok dan fungsi serta 2) pelaksanaan teknis kegiatan pada setiap tahunnya yang dapat diukur dari pagu anggaran serta jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun.

3.1.3 Sarana Prasarana

Berdasarkan data sarana dan prasarana inventaris perkantoran yang disampaikan pada bab sebelumnya, secara umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai namun masih perlu dilakukan modernisasi pada sarana dan prasarana perkantoran yang ada. Adanya tuntutan publik akan pelayanan birokrasi yang cepat serta penguatan peran IT dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-Government), menjadi suatu keharusan bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan masyarakat maupun penunjang administrasi perkantoran.

Selain peningkatan kualitas sarana dan prasarana, optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana juga harus dilakukan. Pemeliharaan terhadap sumber daya sarana dan prasarana tetap harus dilakukan sesuai dengan umur ekonomis dan manfaatnya.

3.1.4 Pelayanan Publik

Berdasarkan lingkup pelayanan yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, pelayanan dilakukan terhadap aparatur dilingkungan Pemerintah Kota Batam (Internal) serta pelayanan kepada masyarakat (Eksternal). Dalam implementasinya, pelayanan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Pelayanan langsung, yakni pelayanan yang dilaksanakan secara bertatap muka baik kepada OPD Pemerintah Kota Batam, Pejabat/Tamu Pemerintah Kota Batam, maupun kepada masyarakat umum;
2. Pelayanan tidak langsung, yakni pelayanan yang dilakukan melalui suatu media seperti layanan konsultasi publik melalui Web Pemko Batam serta media cetak dan elektronik.

Dari aspek pelayanan langsung di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Bagian Keuangan dan Bagian Aset Sekretariat Daerah), permasalahan yang ditemui selama ini adalah belum terorganisirnya pelayanan kunjungan publik. Sebagai pusat penyelenggaraan birokrasi Pemerintah Kota Batam, kunjungan publik cukup tinggi pada setiap harinya. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan pengaturan yang lebih tertib agar proses pemberian pelayanan dapat dilakukan dengan tepat.

Untuk pelaksanaan pelayanan tidak langsung melalui media, perlu dilakukan optimalisasi pelayanan informasi publik yang dilakukan dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur, peningkatan struktur dan infrastruktur, sistim dan prosedur, komunikasi organisasi, serta manajemen komunikasi krisis. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 31 tahun 2011 Tentang pedoman umum infrastruktur hubungan masyarakat dilingkungan Pemerintah. Diamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik, informasi yang disampaikan harus mencakup beberapa aspek yaitu aspek regulatif, edukatif, transparan, jelas dan kredibel.

Berdasarkan hal tersebut dalam pelayanan informasi publik kedepan, perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber data dan informasi kehumasan yang bersumber dari pengolahan data statistik pada bidang-bidang yang ada sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

3.1.5 Pola pikir (*Mindset*) dan Budaya Kerja (*Culture Set*)

Semakin tingginya tingkat kebutuhan publik akan pelayanan pemerintah. Menuntut sumber daya aparatur untuk meningkatkan kinerja secara individual dan kelompok (*team work*). Selain itu, meningkatnya kebutuhan pelayanan publik memberikan tekanan agar sumber daya aparatur untuk meningkatkan kompetensinya dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya (*capacity*).

Pola struktural yang diterapkan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi secara tidak langsung membentuk paradigma tanggung jawab struktural pula, dimana dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab dibebankan kepada Pejabat pada eselon tertentu.

Setiap sumber daya yang ada dalam organisasi memiliki kemampuan sesuai dengan keilmuan dan keahliannya. Potensi yang dimiliki aparatur selama ini terikat pola struktural yang ada, dimana keahlian seseorang tidak teraplikasikan secara optimal karena tidak berada dalam tanggung jawab struktural (staf) dan optimalnya pendistribusian pekerjaan berdasarkan keahlian.

Paradigma lama seperti ini selayaknya dilakukan perubahan cara berpikir (*mindset*) pada ditingkat pelaksana (staf) maupun pimpinan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi harus terdistribusi dengan baik dan tidak mengabaikan potensi sumber daya sekecil apapun dalam organisasi. Dalam teknis pelaksanaan tugas dan fungsi harus dilakukan perubahan mendasar dari pola individual struktural kepada team work fungsional dimana semua unsur dalam organisasi terlibat dan berkontribusi sesuai dengan keahliannya masing-masing.

Apabila perubahan *mindset* ini terbentuk, maka secara bertahap akan membawa perubahan terhadap budaya kerja (*culture set*). Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan secara bersama-sama, lebih terbuka (*transparency*), efektif, serta mampu membangun jaringan kerja yang lebih luas (*network*).

Dengan terbangunnya budaya kerja yang baik akan berdampak pada peningkatan kemampuan kerja (kapasitas) suatu organisasi yang berdampak pada kinerja birokrasi. Dari beberapa uraian diatas, dapat dirangkum berbagai permasalahan yang teridentifikasi berkaitan dengan pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat diuraikan pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Identifikasi Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Opini BPK terhadap LKPD	Belum optimalnya akuntabilitas Kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah	Sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah belum optimal
		Perubahan Regulasi dari Pemerintah Pusat/Provinsi	belum lengkapnya Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Pemerintah masih terus menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga masih banyak penyesuaian yang harus diadaptasi

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	Kurang memahami peraturan
2.	Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertipikat (Pengamanan hukum terhadap tanah milik Pemerintah Kota Batam)	Alas hak tanah tidak ditemukan	Pengarsipan yang tidak tertib
		Batas tanah tidak diketahui	Patok hilang dan pelaku sejarah sudah tidak ada
		Penyelesaian kasus tanah negara (Tanah dikuasai pihak lain)	Tidak optimalnya dalam pengamanan dan kondisi tanah tidak digunakan dan tidak dimanfaatkan

Tabel 3. 2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sumber daya Manusia Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pendistribusian Beban Kerja pada setiap jenjang; 2. Masih Rendahnya Kemampuan Teknis Pelaksanaan Kegiatan; 3. Tingkat Kedisiplinan Cukup Baik; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Beban Kerja; 2. Standar Kompetensi Jabatan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan; 2. Belum tersusunnya analisa beban kerja; 3. Belum optimalnya pendistribusian kerja (bagi habis) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntutan Pelayanan Prima kepada Masyarakat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya Capaian Hasil Pekerjaan; 2. Rendahnya Kualitas Koordinasi; 3. Pendistribusian Pekerjaan yang tidak merata
Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan Prasarana yang perlu dilakukan modernisasi; 2. Belum optimalnya pemanfaatan Sarana dan Prasarana Teknologi; 3. Belum adanya standar pelayanan minimal sarana/prasarana perkantoran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Beban Kerja; 2. Pelaksanaan E-Government 3. ASB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pengelolaan barang inventaris Kantor; 2. Belum adanya analisis efisiensi pembiayaan perawatan barang inventaris; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cepatnya perubahan Teknologi; 2. Tuntutan Pelayanan Bebas IT; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak Optimalnya pemanfaatan Sarana-Prasarana Perkantoran dalam menunjang pelayanan; 2. Pola Pelayanan yang tidak efisien;

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Organisasi dan ketatalaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum dilaksanakan harmonisasi Tugas Pokok dan fungsi terhadap beban kerja; 2. Belum optimalnya penyusunan Standar, sistim dan prosedur dalam mengadopsi ketentuan peraturan; 3. Belum terlaksananya pengukuran kinerja OPD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP; 2. Juklak dan Juknis; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terukurnya kinerja penerapan SOP; 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Belum adanya SPM dibidang Kesekretariat an; 3. Peraturan yang cepat berubah-ubah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terukurnya Kinerja Organisasi dengan Indikator yang jelas; 2. Belum pernah dilakukannya pengukuran kinerja 3. Belum terlaksananya Tugas dan Fungsi sesuai Sistim Prosedur
Pelayanan OPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya daya dukung Data Statistik dalam pelayanan Informasi Publik; 2. Belum terkelolanya dengan baik urusan protokoler tamu daerah, dan publik; 3. Belum terintegrasinya pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat dalam satu kesatuan sistem Informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP; 2. SPM; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terlaksananya Pengukuran Penerapan SOP/SPM 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terukurnya Kinerja Pelayanan dengan indikator yg jelas; 2. Pola pelayanan parsial tidak terintegrasi;

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pola pikir (<i>mindset</i>) dan Budaya Kerja (<i>Culture Set</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran Kinerja hanya dilihat dari tingkat kedisiplinan jam kerja; 2. Pola Kerja Individual-Struktural; 3. Belum berjalannya pola kerja yang berlandaskan <i>leadership</i> dan <i>Teamwork</i>; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan dan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum berjalannya merit sistem 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kualitas integritas pelayanan; 2. Belum terbangunnya pola Kerjasama yang baik.

3.2 Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 2021-2026

Rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang menyusunnya berpedoman pada Rancangan Dokumen RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026. Kepala Daerah yaitu:

“TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA”

Untuk mencapai visi ini telah ditetapkan juga misi penyelenggaraan Pemerintah Kota Batam Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah;
2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang;
3. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia;
4. Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam yang berkaitan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah: Misi ke 5 (lima) “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat”. Selanjutnya misi ke 5 (lima) telah dijabarkan dalam beberapa sasaran kerja sebagai berikut:

1. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas
2. Meningkatnya kemampuan kemandirian keuangan daerah.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Mengacu pada Misi pembangunan RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026. Misi yang secara spesifik menjadi tanggungjawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam adalah Misi 5 (lima) “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat”.

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang hendak dicapai dalam Misi 5 RPJMD 2016-2021 Kota Batam oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Batam adalah sebagai berikut :

Tujuan:

Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel

Indikator Tujuan:

Opini BPK

Sasaran:

1. Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan akuntabel.

Indikator Sasaran:

1. Indeks Kepuasan terhadap layanan Kesekretarisan;
2. Ketepatan waktu dalam penyusunan dan pelaporan APBD;
3. Presentase laporan OPD yang lengkap sesuai SAP;
4. Persentase penurunan masalah penilaian dan pengakuan aset.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Renstra Kementerian Keuangan

Renstra Kementerian Keuangan merupakan gambaran secara makro dari kebijakan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan keuangan bila dilihat dari sudut pandang OPD di Pemerintahan Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dalam menyusun Renstra 2021-2026 menyelaraskan dengan Renstra Kementerian Keuangan, sehingga dalam menyusun Renstra BPKAD Kota Batam salah satu acuan pokok yang digunakan adalah Renstra Kementerian Keuangan 2020-2024.

Pada Sasaran Strategis ke 2 (dua), “Hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan”. Peningkatan kualitas dan efektivitas transfer ke daerah dilakukan melalui kebijakan-kebijakan desentralisasi fiskal untuk mewujudkan hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan. Sistem hubungan keuangan yang lebih baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan mendorong Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah yang sejalan dengan target nasional tanpa mengesampingkan karakteristik masing-masing daerah. Hal ini dimaksud khususnya terkait penyediaan dan pemenuhan pelayanan publik yang prima

dan/atau lebih berkualitas sehingga dapat berimbang pada peningkatan perekonomian, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun visi, misi dan tujuan dari Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

Visi Kementerian Keuangan

“Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Misi Kementerian Keuangan

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan;
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif;
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif;
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum;
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Tujuan Kementerian Keuangan pada tahun 2020-2024 adalah:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal;
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas;
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali;
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Rencana Tata Ruang

Rencana struktur ruang Pemerintah Kota Batam berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam meliputi:

1. pusat kegiatan di wilayah kota dan Rencana pusat kegiatan di wilayah kota meliputi PPK, SPPK, dan PL;
2. sistem jaringan prasarana. rencana sistem jaringan prasarana meliputi sistem jaringan transportasi, sitem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan infrastruktur perkotaan.

Dari Rencana Tata Ruang Pemerintah Kota Batam, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Batam akan berupaya mendukung dari sisi penyelenggaraan

pengelolaan keuangan dan inventarisasi aset sehingga pertanggungjawaban keuangan dan aset-aset yang telah dibangun tercatat dengan baik.

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain;

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan BPKAD yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan BPKAD yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Telaahan terhadap permasalahan dan tantangan yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam yang kemudian dilakukan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal menjadi dasar dalam merumuskan kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis, yaitu keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis yang harus diperhatikan berdasarkan tupoksi BPKAD adalah:

- a. Mempertahankan Opini atas laporan keuangan yang Wajar Tanpa

- Pengecualian;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan perundangan yang berlaku;
 - c. Ketepatan waktu dalam penyusunan perencanaan anggaran dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - d. Belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan aset daerah sesuai dengan perundangan yang berlaku;
 - e. Belum efektif dan efisiennya perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Dari lingkup eksternal, berdasarkan dinamika yang berkembang saat ini, telah teridentifikasi isu-isu strategis yang dijabarkan pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		Road Map Reformasi Birokrasi yang mencakup 7 (tujuh) area perubahan yaitu 1. Organisasi dan tata laksana 2. Peraturan Perundangan 3. Sumber Daya Aparatur 4. Pengawasan 5. Akuntabilitas 6. Pelayanan Publik 7. Perubahan <i>Mindset-Culture set</i> .	1. Peningkatan Kinerja Birokrasi; 2. Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas 3. Tingginya ekspektasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan pemanfaatan ICT	
2	Peningkatan daya saing (kompetitif) Pemerintahan	Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah	1. Penataan Perangkat Daerah 2. Penyusunan Penempatan Jabatan	

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	antar negara		Struktural sesuai Kompetensi	
3		Pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1. Persepsi Indeks Korupsi 2. Pembentukan TP4D	

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Kota Batam 2021–2026 MISI Kelima yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Responsif, Efektif Dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat” Berdasarkan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam menetapkan Tujuan dan sasaran seperti dalam tabel T-C.25/4.1:

Tabel T-C.25 /4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan terhadap layanan Kesekretarisan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan akuntabel	Ketepatan waktu dalam penyusunan dan pelaporan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			Persentase laporan OPD yang lengkap sesuai SAP	97%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase penurunan masalah penilaian dan pengakuan aset	60%	65%	70%	75%	85%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan hal penting yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan harus dirumuskan secara komprehensif, sinkron, konsisten dan Selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Untuk lebih memfokuskan strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dalam pencapaian visi misi secara efektif dan efisien diperlukan analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi. Dalam merumuskan Strategi setiap perangkat daerah pada umumnya menghadapi masalah lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal. Lingkungan internal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang biasanya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang berada di luar kendali organisasi tetapi sangat mempengaruhi kegiatan organisasi tersebut. Untuk merumuskan analisa lingkungan strategis digunakan Teknik analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) dengan sudut pandang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam

5.1.1 Analisa Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor – faktor yang akan menjadi kekuatan dan kelemahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam. Kajian internal pada hakikatnya adalah analisis dan evaluasi atas kondisi di dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam yang meliputi Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*).

1. Kekuatan (*Strength*)

- a. Struktur organisasi yang mendukung;
- b. Kualitas sumber daya manusia yang memadai ;
- c. Memiliki rencana dan program kerja yang sudah tersusun dengan baik;
- d. Pengalaman empirik dari Sumber daya Manusia dibidang pengelolaan keuangan;

- a. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah.;
 - b. Kesiapan SDM dalam melaksanakan tugas tidak terbatas oleh jam kerja yang ditetapkan dalam peraturan Wali Kota.
2. Kelemahan (*Weakness*)
- a. Minimnya jumlah sumber daya manusia;
 - b. Masih kurangnya tenaga teknis dan fungsional;
 - c. Belum optimalnya dukungan dana dengan sarana dan prasarana yang memadai;
 - d. Masih belum optimalnya sistem komunikasi dan koordinasi hubungan internal antar personal, Seksi dan Bidang;
 - e. *Reward* dan *Punishment* belum disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. berdasarkan ukuran kinerja.

5.1.2 Analisa Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal dalam hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sosial Kota Batam. Kajian eksternal pada hakikatnya adalah analisis dan evaluasi atas kondisi di luar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sosial Kota Batam yang meliputi Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threat*).

1. Peluang (*Opportunities*) :

- a. Laju pertumbuhan Ekonomi selama beberapa tahun lalu menunjukkan angka positif dan progresif.
- b. Adanya dukungan politis dari Pemerintah Daerah Kota Batam dan DPRD Kota Batam;
- c. Letak geografis Kota Batam yang strategis serta dikembangkannya Batam sebagai daerah industry, perdagangan dan pariwisata dan alihkapal menarik minat investor datang ke Kota Batam untuk berinvestasi.

2. Ancaman (*Threat*)

- a. Fluktuasi ekonomi makro semakin tidak jelas yang berdampak pada ekonomi mikro;
- b. Perubahan aturan yang cepat mendorong penatausahaan keuangan tidak sesuai dengan kondisi yang ada;
- c. Pemeriksaan bertumpuk dalam waktu bersamaan.



Gambar 5. 1 Bagan SWOT

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan dapat dilihat pada Tabel T-C.26/ 5.1, Hubungan antara misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batam dengan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel T-C.26/5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi Kota Batam : Terwujudnya Batam sebagai bandar dunia madani yang modern dan sejahtera

Misi Kota Batam yang Diampu : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif, dan efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Memfasilitasi proses perencanaan, monev dan pelaporan rencana kerja Perangkat Daerah	Menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan tahunan PD dengan tepat waktu, melaksanakan koordinasi dalam rangka monev dan pelaporan pelaksanaan renja
		Mengoptimisasi pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum ditingkat perangkat daerah	Pemenuhan gaji dan tunjangan asn serta penatausahaan keuangan
			Peningkatan Disiplin Aparatur negara dan atau peningkatan kompetensi SDM perangkat daerah
	Meningkatkan pengelolaan pengadaan dan pemeliharaan aset milik daerah yang ada diperangkat daerah	Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana inventaris operasional perkantoran	
	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan akuntabel	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah
			Mengoptimalkan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan aset daerah
			Meningkatkan pengamanan, pemanfaatan dan penatausahaan aset daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perencanaan adalah suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam telah menyusun berbagai program dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah, dimana program tersebut mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumber daya organisasi, terinci dan sinkron dengan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk kegiatan, yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impact sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Pencapaian kinerja dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang memadai, untuk itu tentunya diperlukan suatu program aksi yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Aktifitas atau kegiatan instansi pemerintah merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat oleh organisasi tersebut. Aktifitas atau kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Rencana kegiatan terdiri dari strategi pokok dan konkret untuk diimplementasikan secara maksimal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan lingkungan yang ada, baik lingkungan internal maupun eksternal.

Dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam masuk dalam Misi ke 5 dari RPJMD Kota Batam yaitu : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan akuntabel dan mengayomi.

Dari misi ke 5 RPJMD Kota Batam tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam menetapkan 3 (tiga) program SKPD sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran. Indikator hasil dari program ini adalah Kegiatan urusan penunjang yang terpenuhi.

2. Program Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam.

Program ini dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Batam.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Batam dalam melaksanakan pembangunan.

Tabel T-C.27 /6. 1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam

TUJUAN	SASARAN	Indikator Tujuan/Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	KEUANGAN														Unit Kerja PD Penanggungjawab	LOKASI
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel		Opini BPK				WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		BPKAD	Kota Batam
	1. Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	1. Indeks Kepuasan terhadap layanan Kesekretarian				100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		BPKAD	Kota Batam
			5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	26.809.823.301,00	100%	28.742.628.589,00	100%	28.742.628.589,00	100%	28.742.628.589,00	100%	31.925.956,024,00	100%	33.148.720.140,00	100%	178.112.385.232,00	Sekretariat	Kota Batam
			5.02.01.2.02	1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	1 Tahun	100%	15.543.271.566,00	100%	21.156.303.221,00	100%	21.156.303.221,00	100%	21.156.303.221,00	100%	23.509.187.890,32	100%	24.409.589.786,80	100%	126.930.958.906,12	Sekretariat	Kota Batam
			5.02.01.2.03	2. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun sesuai ketentuan		100%	840.750,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		840.750,00	Sekretariat	Kota Batam
			5.02.01.2.05	3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana		100%	693.527,00	100%	560.279,30	100%	560.279,30	100%	560.279,30	100%	621.610,691,53	100%	645.418.381,02	100%	3.641.393,972,55	Sekretariat	Kota Batam
			5.02.01.2.06	4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	100%	2.155.142.000,00	100%	2.449.278.168,00	100%	2.449.278.168,00	100%	2.449.278.168,00	100%	2.717.390,229,78	100%	2.821.466.275,58	100%	15.041.833,009,36	Sekretariat	Kota Batam
			5.02.01.2.07	5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang		100%	521.280,00	100%	1.481.961,500,00	100%	1.481.961,500,00	100%	1.481.961,500,00	100%	1.644.185,521,12	100%	1.707.157.826,58	100%	8.318.507,847,70	Sekretariat	Kota Batam

TUJUAN	SASARAN	Indikator Tujuan/Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)														Unit Kerja PD Penanggungjawab	LOKASI
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19	20	21
				Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi																	
			5.02.01.2.08	6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	1 Tahun	100%	1.999.927.200,00	100%	1.761.146.400,00	100%	1.761.146.400,00	100%	1.761.146.400,00	100%	1.953.931.604,46	100%	2.028.767.184,91	100%	11.266.065.189,37	Sekretariat	Kota Batam
			5.02.01.2.09	7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	1 Tahun	100%	367.611.002,00	100%	533.660,00	100%	533.660,00	100%	533.660,00	100%	592.077.490,00	100%	614.754.057,87	100%	3.175.422.549,87	Sekretariat	Kota Batam
			5.02.01.2.10	8. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	100%	100%	4.688.314.533,00	100%	800.000,00	100%	800.000,00	100%	800.000,00	100%	887.572.596,79	100%	921.566.627,24	100%	8.897.453.757,03	Sekretariat	Kota Batam
	2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan akuntabel	1. Ketepatan waktu dalam penetapan dan pelaporan APBD				Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		BPKAD	Kota Batam
			5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD sesuai aturan yang berlaku		Tepat Waktu	9.453.293.862,00	Tepat Waktu	69.796.517.959,00	Tepat Waktu	72.197.518.176,79	Tepat Waktu	74.767.749.823,88	Tepat Waktu	77.526.679.792,39	Tepat Waktu	80.495.951.628,43	Tepat Waktu	384.237.711.242,49		
					Presentase OPD yang Menyusun Laporan Keuangan SKPD lengkap dan tepat waktu		97%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			

TUJUAN	SASARAN	Indikator Tujuan/Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)														Unit Kerja PD Penanggungjawab	LOKASI
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19	20	21
			5.02.02.2.01	9. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran yang harus disusun tepat waktu		97%	1.299.422.500,00	100%	2.040.908.800,00	100%	2.111.116,062,72	100%	2.186.271,794,55	100%	2.266.945,223,77	100%	2.353,769,225,84	100%	12.258.433,606,89	Bidang Anggaran	Kota Batam
				12. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah		0	0,00	100%	745,640,40,00	100%	771,290,429,76	100%	798,748,369,06	100%	828,222,183,88	100%	859,943,093,52	100%	4.003.844,476,22	Bidang Perbendaharaan	Kota Batam
			5.02.02.2.04	13. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dana tidak terduga yang tersedia		97%	7.956.621.362,00	100%	64,731,268.109,00	100%	67,166,239.866,43	100%	69,455,186,797,05	100%	72,124,024,516,09	100%	74,673,726,704,81	100%	356,107,067.355,38	Sekretariat	Kota Batam
		2. Presentase laporan OPD yang lengkap sesuai SAP					97%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		BPKAD	Kota Batam
				10. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		0	0,00	100%	1.056,469.450,00	100%	1.092,811,999,08	100%	1.131,716,106,25	100%	1.173,476,430,57	100%	1.218,420,577,86	100%	5.059.645,313,75	Bidang Perbendaharaan	Kota Batam
			5.02.02.2.03	11. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Pelaporan yang Disusun		97%	197,250,000,00	100%	1.222,231.200,00	100%	1.056,059,818,80	100%	1.195,826,756,97	100%	1.134,011,438,08	100%	1.390,92,026,40	100%	6.195.471,240,25	Bidang Akuntansi	Kota Batam
		3. Presentase penurunan masalah penilaian dan pengakuan aset					60%		65%		70%		75%		85%		100%		100%		BPKAD	Kota Batam
			5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti		100%	849,800,000,00	100%	3.136,616.078,00	100%	3.244,515,670,99	100%	3.360,020,428,88	100%	3.484,005,182,71	100%	3.617,442,581,20	100%	17.692,399,941,78	Bidang Aset	Kota Batam
			5.02.03.2.01	14. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pengelolaan Aset/BMD yang harus Dipenuhi		100%	849,800,000,00	100%	3.136,616.078,00	100%	3.244,515,670,99	100%	3.360,020,428,88	100%	3.484,005,182,71	100%	3.617,442,581,20	100%	17.692,399,941,78	Bidang Aset	Kota Batam

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang ditetapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan misi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang harus dicapai dalam masa periode 2021-2026, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Batam 2021-2026.

Tabel T-C.28 /7. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
I	Indeks Kepuasan terhadap layanan Kesekretarisan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun sesuai ketentuan		100%	0%	0%	0%	0%	0%	
	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
II	Ketepatan waktu dalam penyusunan dan pelaporan APBD		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
III	Persentase laporan OPD yang lengkap sesuai SAP		97%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD sesuai dengan aturan yang berlaku		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
	Persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan SKPD lengkap dan tepat waktu		97%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase OPD yang Menyusun Laporan Keuangan SKPD lengkap dan tepat waktu		97%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Dokumen Penganggaran yang harus disusun tepat waktu		97%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		97%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Persentase Jumlah Dokumen Pelaporan yang Disusun		97%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah		97%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase dana tidak terduga yang tersedia		97%	100%	100%	100%	100%	100%	
IV	Persentase penurunan masalah penilaian dan pengakuan aset		60%	65%	70%	75%	85%	100%	
3	Persentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti		60%	65%	70%	75%	85%	100%	
	Persentase Dokumen Pengelolaan Aset/BMD yang harus Dipenuhi		60%	65%	70%	75%	85%	100%	

BAB VIII PENUTUP

Rencana strategis OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam 2021-2026 merupakan serangkaian tindakan yang disusun dengan melibatkan seluruh jajaran organisasi dengan harapan bahwa rencana strategis ini dapat diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian visi dan misi Kota Batam. Dengan telah disepakati renstra ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan konsolidasi ke dalam sehingga timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas masing-masing. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam harus dapat meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar perangkat daerah dengan harapan bahwa arus informasi yang diterima merupakan salah satu aspek penentu keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi.

Rencana strategis yang telah disusun diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan timbul di kemudian hari, oleh karena itu komitmen di antara semua jajaran harus dijunjung tinggi sehingga Visi dan Misi Pembangunan Kota Batam lima tahun mendatang (2021-2026) yaitu *“Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern Dan Sejahtera”*, selaras dengan Visi RPJMD 2021-2026 yang bertujuan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong dalam hal menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berlandaskan pada pemberdayaan sumber daya manusia dapat tercapai.

Batam, 22 Desember 2021

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah Kota Batam,



Abd. Malik, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.19660727 199603 1 003